

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkaitan antara penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga yang berhubungan dengan efek. Salah satunya terdapat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu pelaku ekonomi negara selain usaha swasta dan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 1, BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan dari negara yang telah dipisahkan. BUMN yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat beberapa sektor diantaranya: sektor farmasi, konstruksi, energi, pertambangan, industri logam, semen, telekomunikasi, bank, angkutan dan prasarana angkutan. Perusahaan yang menjual saham dan terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang telah dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari dua jenis mengenai badan usaha diantaranya adalah badan usaha umum dan perseroan. Terbentuknya Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pembiayaan negara. Menurut Alhaji et al., (2012) tata kelola perusahaan dianggap sebagai lembaga untuk mengurangi dampak mengenai masalah agensi yang terdapat dalam suatu organisasi. Munculnya penerbitan saham atas BUMN dapat menarik perhatian dari investor untuk menanamkan modalnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang telah dijanjikan (Yilmaz and Buyuklu, 2016). Tingginya minat investor terhadap saham atas BUMN memberikan dampak pada pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan harus dibuat dengan beberapa pertimbangan agar dapat menghasilkan laporan yang kredibilitas. Setiap perusahaan berusaha untuk selalu berkembang dan dapat

bersaing antar perusahaan lainnya. Salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan dan dapat bersaing yaitu dengan mengevaluasi kinerja perusahaan.

Selain itu, pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara hukum penerapan *good corporate governance* juga sudah menjadi kewajiban untuk diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang sebagian besar atau semua modal yang dimiliki yaitu milik daerah. Bentuk dari BUMD menurut Undang-Undang selain berupa Perusahaan Umum Daerah juga merupakan Perusahaan Perseroan Daerah atau yang berbentuk PT dengan saham paling sedikit 51% yaitu merupakan milik satu daerah. Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014 telah diatur secara umum mengenai penerapan *good corporate governance* secara umum terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

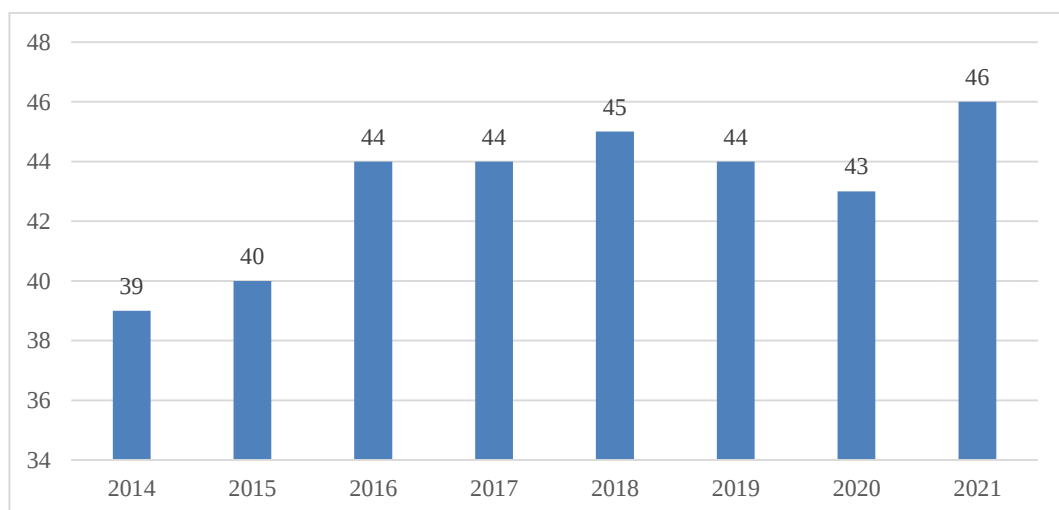
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah harus tunduk juga pada Peraturan Daerah dimana BUMD tersebut berada. Pengawasan dan pembinaan BUMD dilakukan oleh Kepala Daerah atau wakil daerah sebagai dewan pengawas, pemilik modal dan direksi. Kepala Daerah dapat melakukan intervensi pada kebijakan yang telah diambil oleh BUMD untuk kepentingannya. Tata kelola perusahaan dapat berfungsi dengan baik jika ada mekanisme tata kelola perusahaan untuk bertindak sebagai pengawas dan penggerak aturan dalam suatu perusahaan (D. P. Utami et al., 2017). Jadi, keseriusan pada penerapan *good corporate governance* BUMD dalam bentuk ini yaitu sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Daerah tempat BUMD tersebut berada. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diwajibkan untuk patuh atau tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada masa ini, tidak hanya pemerintah yang mulai merasakan bagaimana peranan dalam menerapkan *good corporate governance* di suatu perusahaan, khususnya pada BUMN dan BUMD, akan tetapi hal tersebut juga dirasakan masyarakat umum. Salah satunya yaitu, masyarakat telah mulai aktif dalam melakukan secara aktif dengan mendorong penerapan *good corporate governance* pada BUMN dan BUMD. Hal tersebut dapat dilihat dalam

kemunculan pada berbagai organisasi dan forum dengan berbasis masyarakat dan perusahaan yang secara aktif telah mendorong mengenai penerapan *good corporate governance* yang terdapat di Indonesia.

Banyaknya perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Perusahaan BUMN memiliki kondisi keuangan yang kuat dan kualitas yang begitu baik. Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan publik resmi yang berada di Indonesia, salah satunya yaitu pada perusahaan sub sektor perbankan. Berikut terdapat daftar perkembangan jumlah sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2021:

Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2014-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah perbankan di Bursa Efek Indonesia masih terjadi fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan pada data Bursa Efek Indonesia, saham emiten perbankan masih mendominasi jajaran saham adanya kapitalisasi pasar. Menurut Sunarsip (2003) dalam Simatupang (2019), di negara berkembang seperti Indonesia, dengan adanya industri perbankan menjadi penting karena terdapat *saving-investment* gap yang tidak dapat diatasi dengan anggaran yang ada pada pemerintah. Keterlibatan perbankan pada kegiatan dalam pengumpulan dan penyaluran kembali dana-dana dari masyarakat akan dapat membantu proses

pembangunan perekonomian Indonesia. Selain dapat membantu pembangunan nasional, laba yang diperoleh perbankan khususnya BUMN juga membantu terhadap pendapatan negara yang berupa pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dengan berkembangnya perusahaan dan adanya sistem ekonomi terbuka mendorong perusahaan menjadi semakin kompleks. Semakin kompleks aktivitas dalam perusahaan, maka akan semakin memerlukan praktik *good corporate governance* untuk menunjang kinerja perusahaan. Indikator mengenai tata kelola perusahaan seolah-olah tidak hanya berkaitan dengan laba yang dapat diperoleh baik dari pemilik saham maupun perusahaan saja, namun juga tercermin dari kinerja perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan serta mampu menanamkan rasa kepercayaan bagi masyarakat luas. Menurut Saifi (2019) *corporate governance* adalah suatu sistem yang menghubungkan antara kepentingan pihak eksternal dengan pihak internal dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik keagenan agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses suatu perusahaan agar mampu berkembang secara *continue* serta dapat memenangkan bisnis global terutama bagi perusahaan terbuka (Saifi, 2019). *Corporate governance* menjadi kepentingan bagi setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berguna untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam menghindari kecurangan korporasi serta menentukan arah pengendalian kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka kinerja perusahaan diperlukan untuk melakukan penilaian atas kinerja yang diberikan kepada karyawan dengan melihat bagaimana cara mereka dalam mengambil tindakan atau keputusan guna mencapai tujuan perusahaan.

Dalam memaksimalkan kinerja perusahaan diperkirakan akan menimbulkan antara konflik manajer dan pemegang saham yang biasa disebut dengan *agency problem*. Manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan menjalankan kepentingannya dengan penuh kesadaran

tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang saham dalam suatu perusahaan. Selain itu, terdapat konflik yang muncul akibat ketidakseimbangan mengenai informasi yang dimiliki oleh principal dan agen. Agen akan memiliki lebih banyak informasi tentang suatu keadaan serta kinerja perusahaan secara menyeluruh. Timbulnya konflik kepentingan antara principal dan agen dapat memunculkan biaya keagenan atau *agency cost* (Aini, 2011). *Corporate governance* dapat membantu dalam pengurangan biaya agensi yang mungkin dapat terjadi.

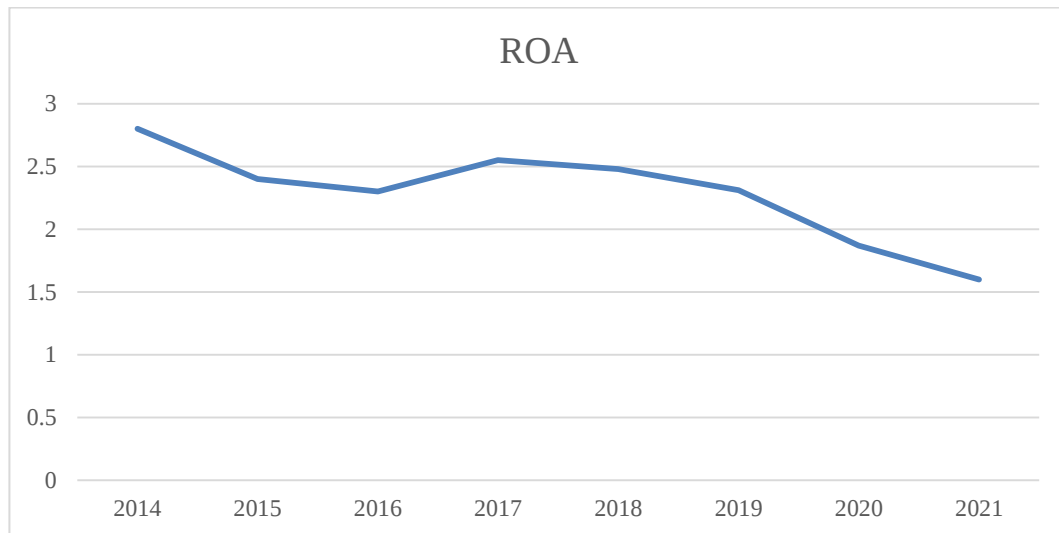
Dari banyaknya cara mengetahui tingkat kinerja perusahaan salah satunya yaitu melalui kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan menunjukkan keefektifan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi, tidak selalu efektif dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga terdapat kendala yang dialami perusahaan dalam menjalankan kinerjanya. Salah satu faktornya karena kondisi perekonomian negara dan juga berpengaruh terhadap perekonomian internal pada perusahaan yang tidak stabil.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank harus diukur dengan penilaian pada faktor-faktor: Risk Profile, Capital, Earnings dan GCG. Menurut Saefullah et al., (2018), profitabilitas merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yaitu dapat berupa rasio diantaranya *Gross Profit Margin (GPM)*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Operating Return On Assets (OPROA)*, *Net Profit Margin (NPM)* dan *Operating Ratio (OPR)*.

Dalam pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)* karena profitabilitas pada Bank Indonesia yang diukur dengan aset sumber dana terbesarnya merupakan dana dari pihak ketiga (Budi gautama Siregar, 2021). *Return On Assets (ROA)* adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya guna mendapatkan *earning*. Semakin besar ROA yang diperoleh perusahaan maka tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva juga akan semakin baik, sehingga laba yang diperoleh akan lebih besar dan sebaliknya (Azis & Hartono, 2017). Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia atau SE No.13/24/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011 mengungkapkan ketentuan batas minimal ROA yang baik bagi bank adalah 1,5%. Jika bank mendapatkan nilai batas minimal 1,5% artinya bank tersebut dinyatakan belum optimal dalam pengelolaan suatu aset perusahaan.

Gambar 1. 2 Grafik Rata-Rata ROA pada Perbankan di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah penulis (2022)

Gambar 1.2 di atas menunjukkan nilai rata-rata Return On Asset (ROA) pada perusahaan perbankan periode 2014-2021. Perhitungan ROA pada perusahaan BUMN dan BUMD diprosikan dengan total laba bersih dibagi total aset tahun 2014-2021 dengan melihat laporan tahunan setiap perusahaan. Meskipun mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2021, nilai rata-rata ROA perusahaan BUMN dan BUMD tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA perusahaan BUMN dan BUMD tidak terdapat nilai dibawah minimal ROA yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan BUMN dan BUMD sub sektor keuangan di Indonesia dapat mengelola asetnya dengan baik.

Fenomena mengenai perolehan laba bersih yaitu pada Bank BRI. Terdampaknya kasus *covid-19* menyebabkan laba bersih pada kuartal III tahun 2020 menurun sebesar 36,9% yaitu sebesar Rp 10,2 triliun dibandingkan dengan semester I tahun 2019, laba bersih yang diperoleh BRI yaitu sebesar Rp 16,16 triliun. Penurunan laba bersih pada semester II tahun 2020 tersebut terjadi karena

berkurangnya daya keuntungan atas profitabilitas. Hal tersebut menyebabkan penurunan nilai ROA pada BRI tahun 2020 yaitu 1,55% sehingga menjadi 1,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum mempunyai perusahaan BRI dalam mempertahankan kinerja keuangan dengan memanfaatkan atau mengelola total aktiva yang dimilikinya.

Fenomena lain juga terjadi pada saat Indonesia terdampak kasus *covid-19* yaitu pada perusahaan BTN yang mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 1,60 triliun pada kuartal IV tahun 2020. Laba yang dihasilkan BTN pada tahun sebelumnya telah meningkat dengan perolehan sebesar Rp 209 miliar. Berdasarkan laporan keuangan BTN, laba bersih perseroan ditunjang dari pendapatan bunga sebesar Rp 25,16 triliun pada kuartal IV tahun 2020. Perolehan pendapatan tersebut didapatkan dari hasil penyaluran kredit yang tetap bertumbuh meskipun berada di bawah tekanan kasus *covid-19*. Hal tersebut menyebabkan nilai ROA pada BTN tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,69% dari tahun sebelumnya sebesar 0,13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BTN dapat menyusun strategi dalam memanfaatkan total aktiva yang dimiliki bahkan juga dapat memperbaiki kinerja keuangannya walaupun di Indonesai pada saat itu terjadi kasus *covid-19*.

Fenomena lain juga terjadi pada saat Indonesia terdampak kasus *covid-19* yaitu pada perusahaan BUMD yaitu Bank Jatim yang mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun pada kuartal IV tahun 2020. Laba yang dihasilkan Bank Jatim pada tahun sebelumnya telah meningkat dengan perolehan sebesar Rp 112 miliar. Hal tersebut menyebabkan nilai ROA pada Bank Jatim tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,78% dari tahun sebelumnya sebesar 2,73%. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan peningkatan total aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Jatim belum mempunyai strategi dalam mempertahankan kinerja keuangan dengan memanfaatkan atau mengelola total aktiva yang dimilikinya.

Menurut Avelia & Esita (2020) kinerja perusahaan merupakan suatu hasil aktivitas dari perusahaan yang dijadikan acuan atas keberhasilan perusahaan. Melalui laporan keuangan, kita dapat mengetahui informasi mengenai kinerja

perusahaan. Informasi tersebut penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Selain berguna untuk manajemen, informasi laporan keuangan juga berguna bagi investor karena dengan informasi tersebut investor dapat memonitor kinerja perusahaan.

Dewan komisaris independen dibentuk dan diangkat sebagai kepentingan perusahaan yaitu untuk meningkatkan pengawasan mengenai kinerja manajemen yang juga akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Korir & Cheruiyot (2017) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Adanya kemungkinan tindakan manajer untuk mencegah dewan komisaris independen dengan memperoleh akses informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan terhadap manajemen, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dewan komisaris independen untuk berkontribusi secara efektif terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan Alshetwi (2017) bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan Institusional memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan mampu mendorong pengawasan secara optimal. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan tersebut, perusahaan mampu menjamin kemakmuran para pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan institusional mendorong manajer agar dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dalam pemantauan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan saham institusional, maka kinerja perusahaan juga akan menjadi lebih baik (Darwis, 2009). Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang diperoleh dari Deswara et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer dapat memperoleh imbal balik secara langsung atas manfaat yang diperoleh dari keputusan yang diambil dan juga ikut menanggung risiko atas sanksi dari

pengambilan keputusan yang salah. Menurut Sabrinna (2010), kepemilikan manajerial merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengelola aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Reddy & Sharma (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Serta hasil penelitian yang dilakukan Christiawan (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Faktor terakhir terkait kinerja perusahaan yaitu *leverage*. Apabila perusahaan mempunyai nilai *leverage* semakin tinggi maka semakin tinggi pula perusahaan menggunakan total utang untuk memperoleh suatu aset perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan berdasarkan penelitian Wardhani et al., (2021) menghasilkan yang sebaliknya bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Adanya perbedaan atas ungkapan dari penelitian sebelumnya, memotivasi peneliti untuk mengembangkan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang relevan. Perusahaan BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional dan dimiliki oleh pemerintah dengan melihat bagaimana kinerja keuangan dilakukan seperti pada gambar 1.1 bahwa sektor keuangan memiliki presentase tertinggi pada perusahaan BUMN. Sehingga, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN” DENGAN MELAKUKAN STUDI KASUS PADA SUB SEKTOR KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2021.**

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana akan keseriusan dalam hal penerapan *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* berperan penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan daya saing perusahaan

menghadapi kompetisi pasar global yang tinggi ini. Kewajiban pelaporan kinerja perusahaan dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mengetahui akan *progress* kinerja perusahaan dan sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan

Berdasarkan penguraian atas rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage* dan Kinerja Perusahaan pada perusahaan BUMN dan BUMD sub sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2021?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap Kinerja Perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage* dan Kinerja Perusahaan pada sub sektor keuangan BUMN dan BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Leverage* terhadap Kinerja Perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap Kinerja Perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan agar tercapainya mengenai penelitian ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dapat tercapai dari hasil perkembangan pengetahuan dalam penelitian yang dilakukan diantaranya:

1) Bagi akademisi

Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bahan ajar bagi akademisi mengenai topik kinerja perusahaan dan dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel-variabel lainnya yang bersangkutan.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan wadah dalam pengembangan untuk penelitian mengenai penerapan *corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2014-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk memperluas pengetahuan dengan mempertimbangkan aspek lain sesuai perkembangan zaman, untuk membuat daya tarik pembaca dalam mengambil penelitian mengenai kinerja perusahaan.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Bagi perusahaan atau organisasi

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar suatu perusahaan memiliki tingkat kewaspadaan untuk meminimalisasi tindakan oportunistik manajemen dalam praktik penyimpangan atas manajemen laba.

2) Bagi investor

Bagi investor dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan dalam memilih perusahaan guna melakukan investasi. Investor diharapkan mampu meminimalisasi risiko atas aktivitas investigasi yang dilakukan dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang diterapkan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penerapan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Membahas penjelasan secara umum dan ringkas secara tepat dari isi penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja perusahaan. Bab ini terdiri atas: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN

Membahas teori yang menjadi dasar penelitian dan menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan disertai hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Membahas pendekatan metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan analisis data yang dapat menjawab penelitian mengenai kinerja perusahaan.

Bab ini meliputi: jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: karakteristik responden, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan disertai dengan saran dari peneliti yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.